

PERBUKHAHARAN INSTRUMENTA



**TAHUN
2018-2023**

**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MAGETAN**

 **Jl. Tripan dita No. 15 Magetan**
 **+62-351-895047**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah selesai disusun. Penyusunan Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan telah berpedoman serta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi, misi dan tujuan Kepala Daerah Terpilih, kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan Indikator Kinerja Utama dan Program/Kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan yang disusun untuk mencapai IKU tersebut. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Renstra Tahun 2019-2023 ini, mudah-mudahan sumbangan pemikiran yang diberikan dapat memberikan kemajuan bagi pembangunan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.

Disadari sepenuhnya bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Magetan, Januari 2022
KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MAGETAN



SUKARTINI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 197404281999012001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| Latar Belakang | 1 |
| Landasan Hukum | 2 |
| Maksud dan Tujuan | 4 |
| Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | 7 |
| Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 7 |
| Sumberdaya OPD | 16 |
| Kinerja Pelayanan OPD | 19 |
| Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas | 23 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 24 |
| Identifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi | 24 |
| Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 25 |
| Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten | 28 |
| Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 31 |
| Penentuan isu-isu strategis | 32 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 33 |
| Tujuan dan Sasaran OPD | 33 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 35 |
| Strategis dan Kebijakan OPD | 35 |
| BAB VI RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF | 37 |
| Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif OPD | 37 |
| BAB VII INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | 42 |
| Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 42 |
| BAB VIII PENUTUP | 44 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan | 15 |
| Tabel 2.2 | Data Pejabat Struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2014-2018 | 16 |
| Tabel 2.3 | Data PNS, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendamping Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2014-2018 | 17 |
| Tabel 2.4 | Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Displin Ilmu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2014-2018 | 17 |
| Tabel 2.5 | Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2014-2018 | 18 |
| Tabel 2.6 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2014-2018 | 21 |
| Tabel 2.7 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2014-2018 | 22 |
| Tabel 3.1 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2014-2019 | 30 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 | 34 |
| Tabel 5.1 | Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 | 36 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 | 38 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 43 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Secara umum Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yakni :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam 5 (lima) tahun mendatang;
- b. Langkah-langkah strategis dan sasaran yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan akan sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Kabupaten Magetan.

Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Capaian Program RPJMD ke dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sesuai Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023. Selain itu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro yang akan

dievaluasi setiap akhir tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan merupakan implementasi Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang disebut Renstra OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan 2019-2023 dan bersifat indikatif.

Ketentuan Pasal 342, Ayat (1), huruf (c) dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar. Lebih lanjut dinyatakan dalam Ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan perubahan mendasar adalah: (i) mencakup terjadinya bencana alam, (ii) guncangan politik, (iii) krisis ekonomi, (iv) konflik sosial budaya, (v) gangguan keamanan, (vi) pemekaran daerah, atau (vii) perubahan kebijakan nasional;

Berdasarkan ketentuan diatas dasar dari perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah adanya krisis ekonomi global sebagai dampak pandemic covid 19 sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap target-target indikator pembangunan daerah, kemudian perlunya penyesuaian dengan kebijakan yang tertuang didalam RPJMN 2020-2024 maupun penyesuaian dengan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana telah di sesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Dengan diterbitkannya peraturan tersebut jelas berdampak dengan berubah struktur keuangan yang ada di daerah ditambah dengan adanya

perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang diatur dalam kepmendagri nomor 050-3708 sehingga perlu penyesuaian di dokumen perencanaan dan penganggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019.
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/57 tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen PPJP Daerah dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
25. Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Untuk memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran OPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

3. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan terutama dibidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Sedangkan Tujuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
2. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mendukung terciptanya tujuan, visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.
3. Menetapkan program dan kegiatan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023.
4. Sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan yang diprioritaskan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
5. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
6. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 disusun, sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
- Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah berisi tentang indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

- Bab IV Tujuan dan Sasaran berisikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan berisikan tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.
- Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah berisikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah berisikan tentang pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
- Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan memiliki peranan yang strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan ekonomi di Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2016, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi di dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dapat dituliskan sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2) Sekretariat, terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri atas : Seksi Kelembagaan dan Perijinan; Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.

- 4) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri atas Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi; dan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.
- 5) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri atas Seksi Fasilitasi Usaha Mikro; Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- 6) UPTD.

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang dan Sekretariat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan, yaitu :

- 1) **Sekretariat**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a) pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
 - b) penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c) pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
 - d) pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e) pengelolaan urusan keuangan;
 - f) pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g) pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
 - h) pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
 - i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
- b) membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan, pangkat, pensiun;

- g) menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a) mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- c) melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- f) melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) menyusun laporan keuangan;
- i) melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j) mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENJA);
- m) melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- q) mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

- r) menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) **Bidang Kelembagaan dan Pengawasan**, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan proses penyuluhan, pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar, serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum serta melakukan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas koperasi.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- b) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen ijin usaha koperasi;
- c) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen ijin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- d) pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- e) pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
- f) pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota/provinsi;
- g) pelaksanaan koordinasi kesehatan koperasi;
- h) pelaksanaan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian koperasi;
- i) pelaksanaan dan penyedia data penilaian kesehatan koperasi;
- j) pelaksanaan penegakan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- k) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

1) **Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas:**

- a) menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- b) menganalisa dokumen izin pembukaan koperasi kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- c) menganalisa dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam dan

Nomor Induk Koperasi (NIK);

- d) merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- e) menganalisa data dan jumlah koperasi yang akurat; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas:

- a) menganalisa dan melaksanakan penyuluhan penerapan peraturan perundang-undangan;
- b) menganalisa penerapan sanksi bagi koperasi dan pemberian bimbingan advokasi;
- c) merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- d) merencanakan, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas:

- a) merencanakan dan melaksanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- b) menganalisa data penilaian kesehatan koperasi;
- c) menyusun data dan menilai kesehatan koperasi;
- d) merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan koperasi; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, mempunyai tugas merumuskan, menyusun program kegiatan, melaksanakan kebijakan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha koperasi. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan koordinasi pemberdayaan koperasi;
- b) pelaksanaan koordinasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c) pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat local dan nasional;

- d) pelaksanaan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e) pelaksanaan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f) pelaksanaan koordinasi pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- g) pelaksanaan koordinasi perlindungan koperasi; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang fasilitasi usaha koperasi;
- b) merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- c) membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- d) mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- e) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha koperasi; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi;
- b) menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c) merencanakan kebutuhan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- d) menyusun konsep pengembangan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- e) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pendidikan dan pelatihan; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi yang mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;
- b) mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c) melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
- d) melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
- e) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan hasil kegiatan bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan, penjabaran kebijakan teknis, melakukan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas pembiayaan usaha mikro. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- b) pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- c) pelaksanaan pengembangan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- d) pelaksanaan pengembangan jaringan informasi bisnis bagi usaha mikro;
- e) pelaksanaan pendataan izin usaha mikro;
- f) pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- g) pelaksanaan pengembangan kewirausahaan;
- h) pelaksanaan fasilitasi jaringan kerjasama usaha mikro dengan lembaga/badan usaha;
- i) pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas:

- a) melaksanakan pengembangan promosi dan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;

- b) melaksanakan pengembangan jaringan informasi bisnis bagi usaha mikro;
- c) menganalisis data ijin usaha mikro;
- d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas:

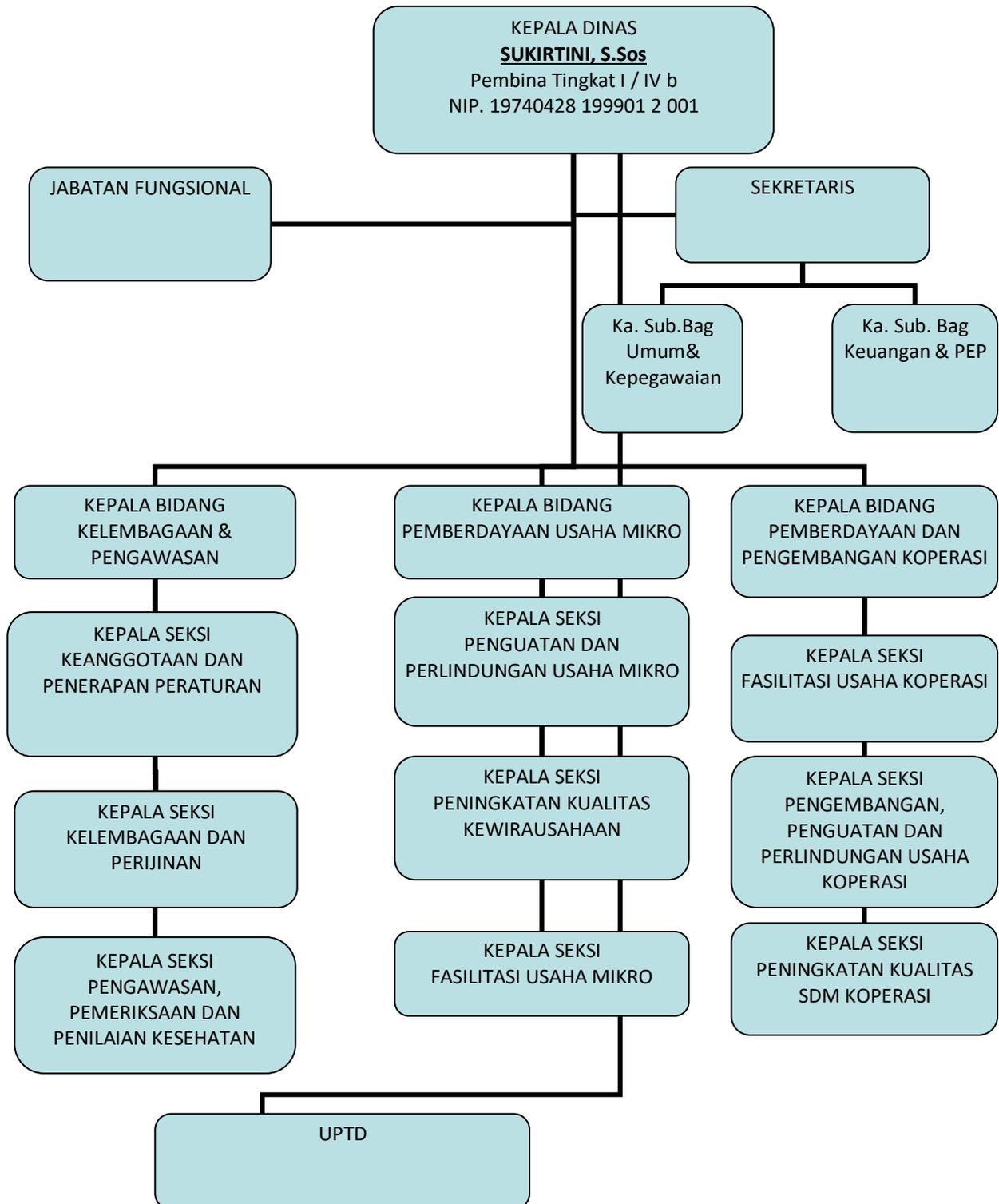
- a) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- b) merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil;
- c) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- d) merencanakan fasilitasi jaringan kerjasama usaha mikro dengan lembaga/badan usaha;
- e) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas:

- a) melaksanakan pemberdayaan kewirausahaan;
- b) merencanakan pengembangan kewirausahaan;
- c) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Tabel 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan



2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

Sumber Daya Manusia

Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan hingga akhir tahun 2018 mencapai 30 orang, dengan rincian 26 orang berstatus PNS (90 persen) dan 3 orang Non PNS (1 persen). Dari total tersebut, 60 persen berjenis kelamin laki-laki dan 40 persen perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana (S1) yaitu sebanyak 48 persen dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Sedangkan yang berpendidikan terakhir S2 dan SLTA masing-masing sebesar 11 persen, dan 26 persen, serta yang berpendidikan SLTP sebanyak 3 persen dan untuk yang berpendidikan sarjana muda sebesar 7 persen dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Pejabat Struktural
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2018

| Unit Kerja | Eselon | | | PNS | | | |
|---|--------|-----|----|-------|--------|---------|--------|
| | IV | III | II | GOL I | GOL II | GOL III | GOL IV |
| Kepala Dinas | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| - Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - |
| - Kasubag Umum & Kepegawaian | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - Kasubag Keuangan & PEP | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - Bidang Kelembagaan & Pengawasan | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - Kasi Kelembagaan dan Perijinan | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - Kasi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - Kasi Fasilitasi Usaha Koperasi | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - Kasi Peningkatan Kualitas SDM | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - Kasi Fasilitasi Usaha Mikro | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - Kasi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Jumlah | 11 | 3 | 1 | - | - | 11 | 4 |

Tabel 2.3
Data PNS, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendamping
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2018

| No | Jabatan Struktural | Pangkat/Gol. Ruang | Pendidikan Formal | Jml | Ket |
|----|--------------------|--|-------------------|-----------|-----|
| 1 | Kepala Dinas | Pembina Tingkat I (IV/b) | S2 | 1 | - |
| 2 | Sekretaris | - | - | - | - |
| 3 | Kepala Bidang | Pembina (IV/a) | S2 dan D2 | 3 | - |
| 4 | Ka. Sub. Bag | Penata Tingkat I (III/d) s.d Penata (III/c) | SMA/S1 | 2 | - |
| 5 | Kepala Seksi | Penata Muda Tingkat I (III/b) s.d Penata Tingkat I (III/d) | SMA/S1 | 9 | - |
| 6 | Staf | Pengatur Tingkat I (II/d) s.d Penata Muda (III/a) | SLTP/SMA/S1 | 11 | - |
| | | - Tenaga Kontrak | SMA | 3 | - |
| | | - Tenaga Pendamping | S1 | 1 | - |
| | | J U M L A H | | 30 | |

Tabel 2.4
Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Displin Ilmu
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2018

| No | Golongan | Jenis Kelamin | | Pendidikan | | | | |
|----|-------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|----------|
| | | L | P | SLTP | SMA | D3 | S1 | S2 |
| 1 | Pembina Tingkat I (IV/b) | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Pembina (IV/a) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 3 | Penata Tingkat I (III/d) | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | Penata (III/c) | 1 | 5 | - | 1 | - | 4 | - |
| 5 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| 6 | Penata Muda (III/a) | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| 7 | Pengatur Tingkat I (II/d) | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 8 | Pengatur (II/c) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Tenaga Kontrak | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
| 10 | Tenaga Pendamping | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | J u m l a h | 17 | 13 | - | 6 | 2 | 15 | 3 |

Asset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah tersedianya asset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan akhir tahun 2018 asset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2018

| No | Nama Barang/Jenis Barang | Merk/Model | Tahun Pembuatan/ Pembelian | Jml | Ket |
|----|---|-------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1 | Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal lainnya | 170 m2 | | 1 | Jl. Lombok No. 36 Magetan |
| 2 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 595 m2 | | 1 | Jl. Yos Sudarso No. 52 Magetan |
| 3 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 320 m2 | | 1 | Jl. Yos Sudarso No. 52 Magetan |
| 4 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 40.518 m2 | | 1 | Jl. Tripandita No. 15 Magetan |
| 5 | Rumah Negara Gol III Type E Permanen | 70 m2 | | 1 | Jl. Lombok No. 36 Magetan |
| 6 | Station Wagon | Toyota KF 50 SPR | 1993 | 1 | |
| 7 | Station Wagon | Suzuki ST Futura 150 | 2001 | 1 | |
| 8 | Station Wagon | Toyota Innova | 2009 | 1 | |
| 9 | Sepeda motor | Yamaha 2 SV | 2014 | 3 | |
| 10 | Sepeda motor | Honda Versa GL 15 | 2015 | 1 | |
| 11 | Sepeda motor | Honda Supra X | 2015 | 1 | |
| 12 | Sepeda motor | Honda Supra X CW F1 | 2016 | 2 | |
| 13 | Mesin Tik | | | 10 | |
| 14 | Mesin Hitung | | | 9 | |
| 15 | Alat Reproduksi | | | 1 | |
| 16 | Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | | | 35 | |

| No | Nama Barang/Jenis Barang | Merk/Model | Tahun Pembuatan/ Pembelian | Jml | Ket |
|----|--------------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|
| 17 | Alat Kantor Lainnya | | | 18 | |
| 18 | Meubelair | | | 257 | |
| 19 | Alat Pengukur Waktu | | | 1 | |
| 20 | Alat Pembersih | | | 1 | |
| 21 | Alat Pendingin | | | 15 | |
| 22 | Home Use | | | 12 | |
| 23 | Pemadam Kebakaran | | | 4 | |
| 24 | Komputer | | | 88 | |
| 25 | Meja Kursi Pejabat | | | 45 | |
| 26 | Alat Studio | | | 6 | |
| 27 | Alat Komunikasi | | | 26 | |

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
4. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan kinerja selama periode 2013-2018 sebagai berikut:

Tabel TC. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
Tahun 2019 - 2020

| No | Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UM | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Dinkop Tahun ke n | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke n | | | | | Rasio Capaian pada Tahun n | | | | |
|----|---|------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-------|---|---|----|------------------------------|---------|----|----|----|----------------------------|------|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Persentase Koperasi Aktif | - | - | - | 74 % | 77 % | | | | 62,8 % | 77,24 % | | | | 84,86 | 100 | | | |
| 2 | Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro | - | - | - | 0,74% | 0,89% | | | | 0,86 % | 0,77% | | | | 116,2 | 86,5 | | | |
| 3 | Jumlah Pertumbuhan Wirusaha Baru | - | - | - | 200 | 250 | | | | 53 | 77 | | | | 26 | 30 | | | |

Tabel TC. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
Tahun 2019 - 2020

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---|---------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 311.205.050 | 379.173.875 | 387.500.000 | 400.000.000 | 390.000.000 | 302.914.366 | 365.652.770 | 328.290.456 | 377.006.079 | 371.338.079 | 97,33% | 96,43 | 97,67% | 94,26% | 95,21% | 7,49% | 5,20% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor | 196.594.000 | 214.173.875 | | | | 189.389.295 | 202.662.222 | | | | 96,34% | 94,63% | | | | | |
| Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | 265.000.000 | 145.000.000 | | | | 249.809.483 | 143.638.048 | | | | 94,27% | 99,06% | | | | | |
| Survei Kepuasan Masyarakat | 30.000.000 | 20.000.000 | | | | 25.280.500 | 19.352.500 | | | | 84,27 | 99,76% | | | | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 266.400.000 | 82.800.000 | 2.144.620.000 | 380.000.000 | 204.000.000 | 87.071.326 | 81.135.293 | 1.134.470.723 | 369.088.300 | 189.244.720 | 97,33% | 97,99% | 52,89% | 97,13% | 92,77% | 60,40% | 113,40% |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 80.000.000 | - | | | | 78.142.000 | - | | | | 97,68% | | | | | | |
| Pemeliharaan rutin kendaraan dinas Operasional | 85.000.000 | 77.800.000 | | | | 78.641.791 | 76.135.293 | | | | 92,52% | 97,86% | | | | | |
| Pengadaan Perlengkapan Kantor | 142.156.000 | 5.000.000 | | | | 141.408.300 | 5.000.000 | | | | 99,47% | 100,00% | | | | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | 90.000.000 | | | | | 85.023.181 | | | | | 94,47% | | | | | | |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal | 90.000.000 | | | | | 85.023.181 | | | | | 94,47% | | | | | | |
| Program peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | 33.000.000 | 28.000.000 | | | | 33.000.000 | 25.300.000 | | | | 100,00% | 90,36% | | | | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 25.000.000 | | | | 30.000.000 | 22.300.000 | | | | 100,00% | 89,20% | | | | | |
| Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | 100,00% | 100,00% | | | | | |
| Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan | 475.000.000 | 351.269.400 | | | | 393.743.250 | 304.743.550 | | | | 82,89% | 86,75% | | | | | |
| Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi | 25.000.000 | 30.000.000 | | | | 21.249.000 | 27.789.700 | | | | 85,00% | 92,63% | | | | | |
| Sosialisai Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian | 30.000.000 | | | | | 28.450.000 | | | | | 94,83% | | | | | | |
| Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi | 85.000.000 | | | | | 72.111.700 | | | | | 84,84% | | | | | | |
| Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama usah Koperasi | 125.000.000 | 160.000.000 | | | | 104.832.350 | 141.533.500 | | | | 83,87% | 88,46% | | | | | |
| Peningkatan Kemampuan Manajemen Perkoperasian | 140.000.000 | 76.089.400 | | | | 118.002.000 | 57.571.850 | | | | 84,29% | 75,66% | | | | | |
| Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian KSP/USP Koperasi | 20.000.000 | 30.000.000 | | | | 17.374.200 | 27.877.000 | | | | 86,87% | 92,92% | | | | | |
| Penilaian Kesehatan Koperasi | 50.000.000 | 55.180.000 | | | | 31.724.000 | 49.971.500 | | | | 63,45% | 90,56% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--|--|--|-------------|---------------|--|--|--|--------|---------|--|--|--|--|--|
| Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Koperasi | 650.000.000 | 315.000.000 | | | | 609.504.000 | 297.966.950 | | | | 93,77% | 94,59% | | | | | |
| Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat | 650.000.000 | 315.000.000 | | | | 609.504.000 | 297.966.950 | | | | 93,77% | 94,59% | | | | | |
| Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi | 640.000.000 | 622.053.800 | | | | 563.215.319 | 546.133.050 | | | | 88,00% | 87,80% | | | | | |
| Pengutan Manajemen Usaha Koperasi | 50.000.000 | | | | | 48.950.000 | | | | | 97,18% | | | | | | |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ritel Koperasi | 40.000.000 | | | | | 39.970.000 | | | | | 99,93% | | | | | | |
| Fasilitasi Pendampingan dan Konsultasi Usaha MKoperasi | 40.000.000 | | | | | 25.550.000 | | | | | 63,88% | | | | | | |
| Fasilitasi Permodalan Usaha Simpan Pinjam Koperasi | 20.000.000 | | | | | 19.730.000 | | | | | 98,65% | | | | | | |
| Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | 20.000.000 | 20.000.000 | | | | 19.565.000 | 16.008.400 | | | | 97,83% | 80,04% | | | | | |
| Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 470.000.000 | 491.010.000 | | | | 409.810.319 | 420.906.550 | | | | 87,19% | 85,72% | | | | | |
| Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DID Tambahan | | 106.643.800 | | | | | 104.818.100 | | | | | 98,29% | | | | | |
| Biaya Pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DID Tambahan (DAU) | | 4.400.000 | | | | | 4.400.000 | | | | | 100,00% | | | | | |
| Program Pemberdayaan Usaha Mikro | 661.250.000 | 1.499.077.200 | | | | 636.294.482 | 1.134.431.300 | | | | 96,23% | 78,29% | | | | | |
| Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah | 45.000.000 | | | | | 44.100.000 | | | | | 98,00% | | | | | | |
| Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi UKM | 100.000.000 | 197.000.000 | | | | 97.175.000 | 127.112.100 | | | | 97,18% | 64,52% | | | | | |
| Peningkatan Jaringan Antar Lembaga | 86.000.000 | 94.000.000 | | | | 83.305.000 | 93.223.300 | | | | 96,87% | 99,17% | | | | | |
| Pengembangan Promosi Produk Usaha Kecil Menengah | 315.250.000 | 301.500.000 | | | | 309.473.682 | 164.947.900 | | | | 98,17% | 54,71% | | | | | |
| Pelatihan Diversifikasi Usaha Mikro | 60.000.000 | 183.500.000 | | | | 57.580.300 | 150.282.000 | | | | 95,97% | 81,90% | | | | | |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 15.000.000 | 17.000.000 | | | | 13.982.700 | 13.148.500 | | | | 93,22% | 77,34% | | | | | |
| Fasilitasi Standarisasi Produk Usaha Mikro | 40.000.000 | | | | | 30.677.800 | | | | | 76,69% | | | | | | |
| Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi UKM DID Tambahan | | 107.768.000 | | | | | 107.768.000 | | | | | 100,00% | | | | | |
| Biaya Pendampingan Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi UKM DID Tambahan (DAU) | | 6.908.000 | | | | | 4.570.000 | | | | | 66,16% | | | | | |
| Pengembangan Promosi Produk Usaha Kecil Menengah DID Tambahan | | 176.283.700 | | | | | 160.006.000 | | | | | 90,77% | | | | | |
| Biaya Pendamping Pengembangan Promosi Produk Usaha Kecil Menengah DID-Tambahan (DAU) | | 8.316.000 | | | | | 4.490.000 | | | | | 53,99% | | | | | |
| Fasilitasi Standarisasi Produk Usaha Mikro did Tambahan (DAU) | | 349.892.900 | | | | | 303.792.900 | | | | | 86,82% | | | | | |
| Biaya Pendamping Fasilitasi Standarisasi Produk Usaha Mikro did Tambahan (DAU) | | 6.908.000 | | | | | 5.090.000 | | | | | 73,68% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|
| Program Penumbuhan Wirausaha Baru | 200.000.000 | 578.328.400 | | | | 199.605.500 | 482.410.850 | | | | 99,80% | 83,41% | | | | | |
| Peningkatan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal | 200.000.000 | 334.275.000 | | | | 199.605.500 | 271.894.900 | | | | 99,80% | 81,34% | | | | | |
| Peningkatan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal DIO Tambahan | | 223.329.400 | | | | | 197.010.950 | | | | | 88,22% | | | | | |
| Biaya Pendampingan Peningkatan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal DID-Tambahan (DAU) | | 20.724.000 | | | | | 13.505.000 | | | | | 65,17% | | | | | |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

2.4.1. Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut diatas maka dapat disampaikan beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam memberikan pelayanan, antara lain :

1. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi dan Usaha Mikro
2. Kecepatan pelayanan perijinan kepada pelaku koperasi dan usaha mikro.
3. Usaha koperasi dan usaha mikro menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Kreatifitas dan inovasi bentuk usaha masyarakat semakin beragam
5. Perlu adanya bimbingan teknis menjadi wirausaha baru.

2.4.2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. Semakin terbukanya bentuk/jenis usaha di masyarakat sehingga memerlukan pendampingan usaha yang berkesinambungan.
2. Telah terjadi hubungan yang saling membutuhkan antara masyarakat dan perangkat daerah sehingga ada peluang untuk menselaraskan program dan kegiatan usaha masyarakat.
3. Kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana usaha sehingga peluang usaha semakin terbuka di masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan dan Pembangunan.

Untuk Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- a. Aspek Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro.
 - Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar.
 - Masih banyaknya koperasi tidak aktif, sehingga perlu dibina agar bisa menjadi aktif lagi.
 - Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan dengan secara menyeluruh oleh Gerakan Koperasi.
 - Masih adanya Asosiasi/Paguyuban yang belum dimanfaatkan oleh UMKM.
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- b. Aspek Sumber Pembiayaan.
 - Pada umumnya Koperasi dan UMKM masih belum memanfaatkan sepenuhnya pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non Bank.
 - Kurangnya Tanggungjawab dan pemahaman Koperasi terhadap bantuan hibah yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- Banyaknya Koperasi yang tidak aktif mempengaruhi penyaluran fasilitas
 - Hukum tidak tegas dan tidak jelas terhadap Koperasi yang melakukan tindak pidana maupun Perdata.
 - Rendahnya akses permodalan bagi pelaku Koperasi dan UMKM terhadap lembaga keuangan.
- c. Akses Pasar (Promosi, sarana pemasaran produk dan terbatasnya pameran produk-produk koperasi).
- Belum optimal Pemanfaatan IT sebagai salah satu sarana pemasaran dan pengembangan produk
 - Belum optimalnya penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro melalui pameran-pameran baik tingkat lokal maupun nasional, Promosi Kabupaten dengan Provinsi, promosi bazar Usaha Mikro.
 - Mutu produk Koperasi dan Usaha Mikro belum memenuhi standar pasar
 - Produk unggulan lokal belum berdaya saing
 - Tidak tercapainya target produksi dalam pemasaran
- d. Aspek SDM dan Pelaku UMKM/Koperasi.
- Kurangnya jiwa wirausaha pelaku koperasi dan usaha mikro
 - Kurangnya pengetahuan anggota tentang tatacara berkoperasi yang benar
 - Kurangnya standar kompetensi gerakan Koperasi
- e. Aspek manajemen koperasi dan usaha mikro.
- Masih kurangnya aspek kemampuan SDM pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya
 - Kurang Optimalnya penguasaan manajemen pengelolaan Retail koperasi
 - Pengelolaan Manajemen KSP/USP masih belum optimal
 - Kurangnya pemanfaatan IT dalam pengelolaan manajemen koperasi dan UMKM
- f. Aspek Penguasaan Teknologi, Desain Produk, Sertifikasi Produk dan lain-lain.
- Masih kurangnya kemampuan SDM Koperasi dan Usaha Mikro

dalam mendiversifikasi produknya

- Terbatasnya informasi tentang kemajuan teknologi yang bisa dikerjakan oleh koperasi
- g. Pengelolaan Program Strategis Provinsi (Koperasi Wanita)
Masih banyaknya SDM Pengelola (Pengurus dan Pengawas) Kopwan yang belum memahami tentang pengelolaan koperasi baik secara administrasi organisasi maupun administrasi keuangan, sehingga perlu diadakan bimtek serta pendampingan yang berkelanjutan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati dan wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2014-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan Visi Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, adalah :

“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”

Secara filosofi Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

- a. **MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART** merupakan kepanjangan dari **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil** yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) zaman *NOW*. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (**sehat**), intelektual (**maju**), religiusitas (**agamis**), sosial (**ramah**) dan motorik (**terampil**) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (**entrepreneur**) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Sehat merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang terbebas dari berbagai penyakit, baik penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit social, dan penyakit lingkungan. Kondisi masyarakat yang sehat memungkinkan untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan pembangunan melalui peran strategis masing-masing elemen masyarakat.

Maju merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki tingkat intelektual/pendidikan memadai (**educated**) dan memiliki wawasan keilmuan yang luas dan progresif sehingga mampu berkiprah secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (**politik, ekonomi, sosial dan budaya**). Kondisi masyarakat yang maju sangat terbuka terhadap upaya-upaya pembaharuan dan perkembangan serta tidak apriori terhadap berbagai unsure kemajuan teknologi walaupun tetap bersikap skeptik dan selektif.

Agamis merupakan perwujudan dari kondisi ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang diwujudkan dalam tata keyakinan (**keimanan**), peribadahan, tata hubungan keluarga dan social masyarakat, serta akhlak dan perilaku budi pekerti yang luhur. Kondisi masyarakat yang agamis memiliki hubungan inter dan antar umat beragama yang toleran, saling menghargai dan menjaga serta saling berkasih sayang sehingga terwujud suasana masyarakat yang damai, aman dan tentram.

Ramah merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang peduli terhadap sesama melalui berbagai unsur komunikasi yang sehat seperti mudah bertegur sapa, mudah akrab, saling bersilaturahmi dan saling berbagi. Kondisi masyarakat yang ramah tidak mudah terpecah belah, terhasut bujuk rayu dan tipu muslihat yang dapat merenggangkan hubungan kemasyarakatan serta persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Terampil merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki penguasaan ketrampilan serta teknologi dan sekaligus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengimplementasikan ketrampilan dan teknologi tersebut dalam berbagai kegiatan produksi. Kondisi masyarakat yang terampil mudah mengelola dan mengolah kesempatan/peluang menjadi kegiatan usaha yang produktif, profitable dan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat ikut serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

- b. **MASYARAKAT MAGETAN YANG SEMAKIN MANTAB** merupakan kepanjangan dari ***Mandiri, Lestari dan Bermartabat*** yang merepresentasikan suasana kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Magetan sebagaimana dicita-citakan dalam RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. Periode Pembangunan Tahun 2019-2024 merupakan periode 5 (lima) tahun terakhir RPJPD Tahun 2005-2025 sehingga dapat disebut sebagai ***Periode Pemantapan***.

Mandiri dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada potensi unggulan/andalan daerah dengan didukung oleh sumber daya manusia yang **SMART**.

Lestari dapat diartikan sebagai perwujudan dari kondisi kehidupan yang ditandai oleh keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan serta kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan sebagai pendukung kualitas kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lestari dapat juga menunjukkan sinergitas pembangunan tiga pilar yaitu perspektif pembangunan sosial, perspektif pembangunan ekonomi, dan perspektif pembangunan lingkungan menjadi arah pembangunan yang berkelanjutan (***sustainable development***).

Bermartabat dapat diartikan sebagai perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki harga diri yang terhormat, dimana masyarakat tersebut memiliki orientasi nilai moral yang tinggi dengan selalu mengutamakan nilai religious dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah perbuatannya, sehingga mewujudkan sebagai suatu masyarakat yang beradab. Bermartabat juga dapat diartikan terbentuknya perilaku, budaya pemerintah dan masyarakat yang menjunjung tinggi religiusitas, akhlak mulia dan nilai-nilai luhur tradisi dan budaya masyarakat madani serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dikembangkan melalui kepemimpinan yang tulus ikhlas, amanah, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Percepatan dan Perluasan Pembentukan Sumberdaya Manusia yang SMART (**Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil**)
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Keberpihakan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Basis Sekaligus Ujung Tombak Pembangunan Daerah.
3. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
4. Memantapkan Ketercukupan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana dan Fasilitas bagi Kegiatan Pelayanan Masyarakat.
5. Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil.

Sedangkan misi yang mendukung sesuai tugas, pokok, fungsi dan wewenang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan yaitu :

MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI KEBERPIHAKAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI BASIS SEKALIGUS UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN DAERAH.

Dengan didukung 6 (enam) program unggulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (**Good Governance**) dan Pemerintah yang Bersih (**Clean Government**) dengan penerapan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Manajemen Pemerintahan Elektronik (**e-planning, e-budgeting dan e-governmment**).
2. Penyediaan dan Pengembangan SDM yang **SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil)**.
3. Pengembangan Potensi Daerah melalui **Triple Agro** Yang Sinergis (**Agro Industri, Agro Bisnis dan Agro Wisata**).
4. Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi untuk Semakin Sehat dan Usaha Mikro (**UM**) untuk Naik Kelas (**Menjadi Usaha Kecil**).

5. Peningkatan Keberpihakan terhadap Kegiatan Investasi Daerah agar mempercepat Kabupaten Magetan sebagai daerah yang ramah dan menarik investasi (***Friendly Area and Attractive Investment***).
6. Pemberdayaan Desa Mandiri dan Tangguh dimana masing-masing Desa difasilitasi dengan pembinaan dan pengembangan.
 - a. Pasar Desa : Tempat bertransaksi hasil bumi dan keperluan bagi masyarakat desa yang berhubungan dengan Pasar Tradisional Daerah dan Pasar Modern.
 - b. BUMDes : Tempat optimalisasi investasi pemerintah dan masyarakat desa dan sebagai salah satu tri pelaku ekonomi yang strategis.
 - c. VBC : ***Village Business Center*** = Pusat Bisnis Desa, tempat masyarakat desa menjual produk-produk unggulan/andalannya (***showroom***)
 - d. TransDes : Sistem Transportasi Desa sebagai jaringan transportasi yang mendekatkan jarak dan percepatan capaian tujuan yang menghubungkan inter dan antar desa serta kota tujuan.

Dengan sinergitas 4 (empat) prasarana dan sarana tersebut akan mempercepat Desa menjadi : Desa Agro Industri, atau Desa Agro Bisnis, atau Desa Agro Wisata.

Strategi :

1. Pembinaan Pelaku Koperasi secara berkesinambungan
2. Pembinaan kualitas produk dan pemasaran Usaha Mikro
3. Pembinaan kewirausahaan yang berbasis potensi lokal

Arah kebijakan :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
2. Peningkatan dan pengembangan usaha mikro
3. Penumbuhan wirausaha baru

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan, antara lain :

Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya jumlah personil
2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja

3. Terbatasnya jumlah anggaran
4. Kurangnya regulasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Faktor Pendorong :

1. Adanya perhatian dari Pemerintah Daerah
2. Adanya partisipasi dari Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro sangat tinggi.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Telaahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level provinsi dengan nasional. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga Teknis di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menetapkan program-programnya sesuai RPJMN. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah suatu Departemen Kementerian Negara yang menangani Urusan Pemerintahan dalam rangka Penajaman, Koordinasi dan sinkronisasi Program Pemerintah bidang Pemberdayaan Koperasi UMKM. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah menetapkan Visi, yaitu :

”TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Untuk mencapai Visi diatas berikut dijabarkan Misi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2014-2019 telah disusun dan disempurnakan. Ringkasan penyempurnaan RENSTRA Kementerian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014-2019

| No. | Visi | Misi | Tujuan | Sasaran Strategis | Target Kinerja |
|-----|---|--------------------------------------|--|---|--|
| 1. | Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. | Mewujudkan bangsa yang berdaya saing | Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan. | 1. Meningkatkan kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan | 9.393 kop, 1.075 pasar, 1 basis data, 22 paket fasilitasi |
| | | | | 2. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM | 18.460 kop, 158.000 SDM kop dan umkm yg mendapatkan pelatihan, 1.000 kurasi produk kop dan umkm, 600.000 kop dan umk penerima dana bergulir, 215 unit PLUT KUMKM |
| | | | | 3. Meningkatkan wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan | 50.000 WUB, 24.800 WUB yg dapat dukungan modal awal, 2.450 technopreneur, 100 penguatan incubator bisnis |
| | | | | 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat | 2,27% peningkatan partisipasi anggota dalam permodalan kop, 7,5% peningkatan jumlah anggota koperasi, 18% peningkatan volume usaha koperasi, 20.000 kop berkualitas, 1.832 PPKL, 10.000 Akta Koperasi |

Hasil review terhadap telaahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakanstrategis dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.

Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Provinsi Jawa Timur.

Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi
2. Meningkatnya Produktivitas Koperasi
3. Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDRB
4. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru dan Omset UMKM di Sentra
5. Meningkatnya Standarisasi UMKM dan Produk UMKM
6. Meningkatnya Kinerja Koperasi Simpan Pinjam.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032, telaahan struktur ruang wilayah sebagai berikut :

1. Penelaahan Rencana Struktur Ruang
2. Deskripsi Tabel Rencana Struktur Ruang
3. Menelaah Rencana Pola Ruang

Adapun hasil analisis terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian dalam bidang pertanian dan industri.

2. Pengembangan industry kecil/menengah yang potensial (agroindustri), pengembangan usaha/industry kerajinan potensial, penguatan pangsa pasar, perlindungan pada usaha ekonomi lemah, penguasaan dan pemanfaatan IPTEK dan peningkatan ketrampilan SDM sebagai sarana diversifikasi usaha ekonomi.
3. Pengembangan KUMKM agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan produktifitas serta daya saing dan kemandirian UMKM di pasar dalam/luar negeri, peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan komoditas perkebunan.
4. Pengembangan komoditas unggulan melalui pemberdayaan masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan agrobisnis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang dapat direkomendasikan berdasarkan identifikasi permasalahan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya persentase koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat
- b. Rendahnya daya saing produk usaha mikro
- c. Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru dan usaha mikro
- d. Minimnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan usaha mikro
- e. Kurangnya promosi dan pemasaran produk usaha mikro
- f. Minimnya diversifikasi usaha koperasi dan usaha mikro
- g. Kurangnya kompetensi SDM pelaku koperasi dan usaha mikro

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.

4.1.1. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Adapaun tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 yaitu : **Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro**. Sedangkan untuk menilai keberhasilan tujuan ini, pada akhir periode Renstra dapat diukur dengan indikator :

1. Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas
2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang dibina

4.1.2. Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari suatu tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu oleh instansi pemerintah untuk merumuskan yang lebih spesifik dan terukur.

Adapun sasaran langsung yang akan dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi yang berkualitas
2. Persentase Usaha Mikro yang dibina

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel TC. 25
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
 Tahun 2019-2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke - | | | | |
|----|--|--|--|--------------------------------------|---|------|-------|-------|-------|
| | | | Tujuan | Sasaran | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya pertumbuhan koperasi yang berkualitas | Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas | Persentase koperasi yang berkualitas | | | 4,3% | 4,8% | 5,3% |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro yang dibina | Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro | Persentase Usaha Mikro yang dibina | | | 0,84% | 0,94% | 1,04% |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mewujudkan Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Magetan, yaitu Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Keberpihakan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Basis Sekaligus Ujung Tombak Pembangunan Daerah, maka diperlukan strategis dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun hasil rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan terhadap setiap sasaran yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel TC. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------|---|--|---|---|
| VISI | : | Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera | | | | P-RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 | | |
| MISI 2 | : | Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Keberpihakan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Basis Sekaligus Ujung Tombak Pembangunan Daerah | | | | | | |
| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | | |
| Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro | 1 | Meningkatnya pertumbuhan koperasi yang berkualitas | | 1 | Pembinaan Pelaku Koperasi secara berkesinambungan | | 1 | Meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan koperasi |
| | 2 | Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro yang dibina | | 2 | Pembinaan kualitas produk dan pemasaran Usaha Mikro | | 2 | Meningkatkan kapasitas usaha mikro |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjabaran dari tabel 5.1 yang menjelaskan tentang strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan tahun 2018-2023. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan **outcome**. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (**output**) dari kegiatan yang dilaksanakan.

Data capaian pada tahun awal perencanaan menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan proyeksi capaian tahun 2019. Target kinerja program/kegiatan yang bersifat persentase atau rasio, pada akhir tahun renstra menunjukkan capaian pada tahun ke-5. Sedangkan target kinerja program/kegiatan yang bersifat angka absolut, kondisi pada akhir tahun renstra menunjukkan akumulasi dari capaian setiap tahunnya. Adapun secara rinci disajikan melalui tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel TC. 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
Tahun 2018-2023

| Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/output) | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | |
|---|--|--|--|---------|---|--|-----------------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|---------------|---|--------|--|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Keberpihakan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Basis Sekaligus Ujung Tombak Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Memperkuat Perekonomian Daerah Yang Berkualitas | Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkualitas | Nilai PDRB sektor Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Kemampuan/Kebudayaan Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Yang Berkualitas | 1.1.1 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Persentase Koperasi Aktif % | 83.24% | 74% | 475,000,000 | 77% | 621,000,000 | 79% | 669,000,000 | 82% | 717,000,000 | 85% | 717,000,000 | 85% | 3,199,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | |
| | | | | 1.1.1.1 | Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi | Jumlah Koperasi Yang Direvitalisasi Koperasi | | 33 | 25,000,000 | 35 | 30,000,000 | 36 | 32,000,000 | 37 | 34,000,000 | 39 | 38,000,000 | 180 | 159,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | |
| | | | | 1.1.1.2 | Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi | Jumlah koperasi yang mendapatkan Bimtek SOP, SOM dan kelayakan usaha koperasi Koperasi | | 100 | 125,000,000 | 125 | 160,000,000 | 130 | 165,000,000 | 135 | 170,000,000 | 140 | 175,000,000 | 630 | 795,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | |
| | | | | 1.1.1.3 | Peningkatan Kemampuan Manajemen Perkoperasian | Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Bimtek SKKNI, Bimtek Penyusunan RARK dan RAT Koperasi, Bimtek Sistem Pengendalian Intern (SPI) Koperasi Koperasi | | 350 | 140,000,000 | 375 | 150,000,000 | 400 | 160,000,000 | 425 | 170,000,000 | 450 | 180,000,000 | 2000 | 800,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | |
| | | | | 1.1.1.4 | Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian | Jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Sosialisasi Tentang Peraturan Perkoperasian Koperasi | | 100 | 30,000,000 | 120 | 36,000,000 | 140 | 42,000,000 | 160 | 48,000,000 | 180 | 54,000,000 | 700 | 210,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/out come) | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|---|--|--|--|----------|---|---|-----------------|---|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|-------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | 1.1.1.5 | Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi | Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Koperasi | | 33 | 85,000,000 | 40 | 90,000,000 | 45 | 95,000,000 | 47 | 100,000,000 | 50 | 55,000,000 | 215 | 425,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 1.1.1.6 | Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian KSP/USP Koperasi | Jumlah KSP/USP Koperasi Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi | | 20 | 20,000,000 | 30 | 30,000,000 | 40 | 40,000,000 | 50 | 50,000,000 | 60 | 60,000,000 | 200 | 200,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 1.1.1.7 | Penilaian Kesehatan Koperasi | Jumlah Koperasi Yang Mendapat Penilaian Koperasi | | 50 | 50,000,000 | 75 | 75,000,000 | 75 | 75,000,000 | 75 | 75,000,000 | 75 | 75,000,000 | 350 | 350,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 1.1.1.8 | Peringatan Hari Koperasi | Jumlah Koperasi yang mengikuti peringatan hari koperasi Koperasi | | | 0 | 500 | 50,000,000 | 500 | 60,000,000 | 500 | 70,000,000 | 500 | 80,000,000 | 500 | 260,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Keberpihakan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Basis Sekaligus Ujung Tombak Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Memperkuat Perekonomian Daerah Yang Berkualitas | Pertumbuhan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan | Nilai Omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Yang Berkualitas | 02.17.03 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase Koperasi Aktif % | | | | | | 58% | 100,000,000 | 62% | 182,000,000 | 65% | 192,000,000 | 185% | 474,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/out come) | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--|--|--------|---------|-----------------|--|---|-----------------|---|-----|--------|-----|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|-------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | 02.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase pertumbuhan koperasi aktif Koperasi | | | | | | 3 | 100,000,000 | 3 | 162,000,000 | 5 | 192,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.17.03.2.01.01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan Koperasi | | | | | | 30 | 50,000,000 | 30 | 80,000,000 | 30 | 100,000,000 | 630 | 795,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.17.03.2.01.01 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan Koperasi | | | | | | 36 | 50,000,000 | 40 | 82,000,000 | 45 | 92,000,000 | 2000 | 800,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 02.17.04 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persentase Koperasi Sehat % | | | | | | 75 | 400,000,000 | 77 | 585,000,000 | 80 | 565,000,000 | 700 | 210,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 02.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya dan dibina Koperasi | | | | | | 100 | 400,000,000 | 100 | 585,000,000 | 100 | 565,000,000 | 215 | 425,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/out come) | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--|---|---|---|-----------------|---|---|-----------------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|---------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | 2.17.04.2.01.01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan koperasi Koperasi | | | | | | 50 | 50,000,000 | 75 | 75,000,000 | 75 | 75,000,000 | 200 | 200,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.17.04.2.01.02 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mengikuti pembinaan dan penghargaan koperasi Koperasi | | | | | | 100 | 350,000,000 | 150 | 510,000,000 | 100 | 490,000,000 | 350 | 350,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkualitas | Nilai PDRB sektor Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Kemampuan/Keb erdayaan Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Yang Berkualitas | 1.1.2 | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi | Persentase Koperasi Aktif % | 83.24% | 74% | 170,000,000 | 77% | 200,000,000 | 79% | 245,000,000 | 82% | 280,000,000 | 85% | 310,000,000 | 85% | 1,205,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 1.1.2.1 | Penguatan Manajemen Usaha Koperasi | Jumlah Koperasi yang mengikuti temu usaha Koperasi | | 50 | 50,000,000 | 60 | 60,000,000 | 70 | 70,000,000 | 80 | 80,000,000 | 90 | 90,000,000 | 350 | 350,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 1.1.2.2 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ritel Koperasi | Jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Bimtek Pengembangan Usaha Ritel Koperasi Koperasi | | 50 | 40,000,000 | 60 | 45,000,000 | 70 | 55,000,000 | 80 | 60,000,000 | 90 | 70,000,000 | 350 | 270,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 1.1.2.3 | Fasilitasi Pendampingan dan konsultasi usaha koperasi | Jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Pendampingan Koperasi | | 40 | 40,000,000 | 50 | 50,000,000 | 60 | 60,000,000 | 70 | 70,000,000 | 80 | 80,000,000 | 300 | 300,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 1.1.2.4 | Fasilitasi Permodalan usaha simpan pinjam koperasi | Jumlah Koperasi yang mengikuti fasilitasi permodalan Koperasi | | 40 | 20,000,000 | 50 | 25,000,000 | 75 | 40,000,000 | 100 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 | 365 | 185,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 1.1.2.5 | MONitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | Jumlah Koperasi Yang Di Bina dan Monitoring Koperasi | | 50 | 20,000,000 | 50 | 20,000,000 | 50 | 20,000,000 | 50 | 20,000,000 | 50 | 20,000,000 | 250 | 100,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 1.1.3 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi, dan Usaha Mikro | Persentase Koperasi Aktif % | 83.24% | 74% | 300,000,000 | 77% | 300,000,000 | 79% | 300,000,000 | 82% | 300,000,000 | 85% | 300,000,000 | 85% | 1,500,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/out come) | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | |
|--|--|--|--|-----------------|--|--|-----------------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|---|--------------------------------|-----|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | | | Rp. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | 1.1.3.1 | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat | Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan ketrampilan Koperasi | | 200 | 300,000,000 | 200 | 300,000,000 | 200 | 300,000,000 | 200 | 300,000,000 | 200 | 300,000,000 | 1000 | 1,500,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan | Nilai Omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Yang Berkualitas | 2.17.05 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Persentase Koperasi Dan UM yang bersertifikat % | | | | | | 38% | 460,000,000 | 43% | 491,010,000 | 43% | 510,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang Memiliki sertifikat pendidikan/ pelatihan Koperasi | | | | | | 100 | 300,000,000 | 100 | 441,010,000 | 100 | 460,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan Koperasi | | | | | | 100 | 300,000,000 | 100 | 441,010,000 | 100 | 460,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.17.05.2.03 | Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Usaha Mikro yang Memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan UM | | | | | | 75 | 160,000,000 | 25 | 50,000,000 | 25 | 50,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.17.05.2.01.02 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro Uang mengikuti pelatihan Usaha Mikro | | | | | | 75 | 160,000,000 | 25 | 50,000,000 | 25 | 50,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.17.06 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase Koperasi Yang telah diberdayakan dan dilindungi % | | | | | | 12 | 470,000,000 | 15 | 200,000,000 | 20 | 250,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/out come) | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------------|--|---|-----------------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|---|---------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan Koperasi | | | | | | 50 | 470,000,000 | 50 | 200,000,000 | 50 | 250,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.17.06.2.01.01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang meningkat usahanya Koperasi | | | | | | 50 | 470,000,000 | 50 | 200,000,000 | 50 | 250,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkualitas | Nilai PDRB sektor Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Kemampuan/Keb erdayaan Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro | 1.2.1 | Program Pemberdayaan Usaha Mikro | Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro % | 5.52% | 6.63% | 660,000,000 | 7.86% | 857,000,000 | 9.18% | 945,000,000 | 10.51% | 1,057,500,000 | 11.97% | 1,150,000,000 | 11.97% | 4,669,500,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 1.2.1.1 | Peningkatan jaringan antar lembaga | Jumlah Usaha Mikro Yang Mengikuti Kemitraan UMKM | | 200 | 100,000,000 | 225 | 115,000,000 | 250 | 125,000,000 | 275 | 140,000,000 | 300 | 150,000,000 | 1250 | 630,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 1.2.1.2 | Sosialisasi Kebijakan tentang usaha kecil menengah | Jumlah Usaha Mikro Yang Mengikuti Sosialisasi UMKM | | 300 | 45,000,000 | 325 | 50,000,000 | 350 | 55,000,000 | 375 | 60,000,000 | 400 | 75,000,000 | 1750 | 285,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 1.2.1.3 | Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan | Jumlah Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pembinaan UMKM | | 60 | 15,000,000 | 70 | 17,000,000 | 80 | 20,000,000 | 90 | 22,500,000 | 100 | 25,000,000 | 400 | 99,500,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 1.2.1.4 | Pengembangan promosi produk usaha kecil menengah | Jumlah Produk Usaha Mikro Yang Mengikuti Promosi UMKM | | 80 | 300,000,000 | 85 | 425,000,000 | 90 | 450,000,000 | 95 | 475,000,000 | 100 | 500,000,000 | 450 | 2,150,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/out come) | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------------|---|--|-----------------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|---|---------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | 1.2.1.5 | Pelatihan diverifikasi usaha mikro | Jumlah Usaha Mikro Yang Mengikuti Pelatihan Diversifikasi Produk UMKM | | 40 | 60,000,000 | 50 | 75,000,000 | 60 | 90,000,000 | 75 | 115,000,000 | 80 | 120,000,000 | 305 | 460,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 1.2.1.6 | Fasilitasi Permasalahan proses produksi UKM | Jumlah Usaha Mikro Yang Mengikuti Pelatihan UMKM | | 160 | 100,000,000 | 175 | 115,000,000 | 200 | 125,000,000 | 225 | 145,000,000 | 250 | 160,000,000 | 1010 | 645,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 1.2.1.7 | Fasilitasi Standarisasi Produk Usaha Mikro | Jumlah Produk Usaha Mikro Yang Mendapat Fasilitas Standarisasi UMKM | | 10 | 40,000,000 | 15 | 60,000,000 | 20 | 80,000,000 | 25 | 100,000,000 | 30 | 120,000,000 | 100 | 400,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan | Nilai Omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro | 2.17.08 | Program Pengembangan UMKM | Persentase Usaha Mikro yang naik kelas % | | | | | | 12% | 760,000,000 | 12,5% | 1,500,000,000 | 12,7% | 1,500,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah Usaha mikro yang berorientasi naik kelas UM | | | | | | 10 | 760,000,000 | 10 | 1,500,000,000 | 10 | 1,500,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.17.08.2.01.01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi UM | | | | | | 100 | 760,000,000 | 110 | 1,500,000,000 | 120 | 1,500,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkualitas | Nilai PDRB sektor Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Kemampuan/Keb erdayaan Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha | 1.3.1 | Program Penumbuhan Wirausaha baru | Pertumbuhan Wirausaha Orang | 400 | 300 | 200,000,000 | 400 | 250,000,000 | 510 | 300,000,000 | 675 | 350,000,000 | 875 | 400,000,000 | 875 | 1,500,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/out come) | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------|--|---|-----------------|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|---|---------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | 1.3.1.1 | Peningkatan Kewirausahaan berbasis Potensi lokal | Jumlah WUB yang mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Pemuda dan Lulusan SLTA Sederajat Orang | | 200 | 200,000,000 | 250 | 250,000,000 | 300 | 300,000,000 | 350 | 350,000,000 | 400 | 400,000,000 | 1500 | 1,500,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan | Nilai Omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro | 2.17.07 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase UMKM yang telah diberdayakan % | | | | | | 26.00% | 800,000,000 | 28.00% | 1,110,000,000 | 30.00% | 1,420,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah usaha mikro yang diberdayakan UM | | | | | | 250 | 800,000,000 | 275 | 1,110,000,000 | 300 | 1,420,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pendataan potensi dan pengembangan UM UM | | | | | | 200 | 525,000,000 | 225 | 700,000,000 | 250 | 900,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang menjalin kemitraan UM | | | | | | 100 | 115,000,000 | 100 | 150,000,000 | 125 | 200,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi perizinan UM | | | | | | 30 | 130,000,000 | 35 | 200,000,000 | 40 | 250,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang mendapatkan penguatan kelembagaan potensi dan pengembangan UM UM | | | | | | 175 | 30,000,000 | 175 | 60,000,000 | 175 | 70,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/out come) | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | |
|--|--|--------|--|---------|--|--|-----------------|---|-------------|--|-------------|--|---|------------|--|------------------|--|---|---------------|---|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | | Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi | 1.1.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran % | 100 | 100 | 470,000,000 | 100 | 540,000,000 | 100 | 555,000,000 | 100 | 565,000,000 | 100 | 575,000,000 | 100 | 2,705,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | |
| | | | | 1.1.1.1 | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Ketersediaan Pelayanan Administrasi % | | 100 | 175,000,000 | 100 | 235,000,000 | 100 | 240,000,000 | 100 | 245,000,000 | 100 | 250,000,000 | 100 | 1,145,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | |
| | | | | 1.1.1.2 | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah % | | 100 | 265,000,000 | 100 | 270,000,000 | 100 | 275,000,000 | 100 | 275,000,000 | 100 | 275,000,000 | 100 | 1,360,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | |
| | | | | 1.1.1.3 | Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Angka | | 1 | 30,000,000 | 1 | 35,000,000 | 1 | 40,000,000 | 1 | 45,000,000 | 1 | 50,000,000 | 5 | 200,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | |
| | | | | 2.1.2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi % | 100 | 100 | 330,000,000 | 100 | 315,000,000 | 100 | 532,000,000 | 100 | 1,111,000,009 | 100 | 628,000,000 | 100 | 2,916,000,009 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | |
| | | | | 2.1.2.1 | pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan yang diadakan Angka | | 0 | 0 | 6 motor | 150,000,000 | 3 motor, 1 mobil | 375,000,000 | 0 | 0 | 3 motor, 1 mobil | 375,000,000 | 12 Motor, 2 Mobil | 900,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | |
| | | | | 2.1.2.2 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Angka | | 1 | 165,000,000 | 1 AC, running text LED, 2 lap top, 2 printer, 1 LED, 1 rak arsip, 1 genset, 1 set kursi tamu | 45,000,000 | 1 TV LED, white board, 2 printer, 1 kamera, 2 mesin penghancur kertas, 1 bh meja laptop, 1 TP link | 2 papan pengumuman, 2 laptop, 1 mesin penghancur kertas, 2 meja kerja | 62,000,000 | 1 CCTV, 1 laptop, 1 printer, 1 scanner, 1 kamera, 2 meja kerja | 71,000,000 | 10 kursi kerja, 2 laptop, 2 printer, 1 mesin penghancur kertas, 2 meja kerja | 93,000,000 | 49 | 436,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.1.2.3 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Jumlah rumah dinas yang dipelihara Angka | | 1 | 0 | 1 | 35,000,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35,000,000 | 1 | 70,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/out come) | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--|--|--------|---------|--------------|---|--|-----------------|---|------------|------------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---|-------------|---|-----|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | 2.1.2.4 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun Angka | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 780,000,000 | 1 | 0 | 1 | 780,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.1.2.5 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara Angka | | 3 mobil 7 motor | 85,000,000 | 3 mobil 13 motor | 85,000,000 | 4 mobil 13 motor | 95,000,000 | 4 mobil 16 motor | 110,000,000 | 4 mobil 16 motor | 125,000,000 | 4 Mobil, 16 Motor | 500,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.1.2.6 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara Angka | | 1 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150,000,009 | | 0 | 1 | 230,000,009 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 3.1.3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkat % | 100 | 100 | 90,000,000 | 100 | 95,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 110,000,000 | 100 | 115,000,000 | 100 | 510,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 3.1.3.1 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai | | 30 | 90,000,000 | 30 | 95,000,000 | 35 | 100,000,000 | 35 | 110,000,000 | 35 | 115,000,000 | 165 | 510,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 4.1.4 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan % | 100 | 100 | 33,000,000 | 100 | 28,000,000 | 100 | 28,000,000 | 100 | 28,000,000 | 100 | 33,000,000 | 100 | 150,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 4.1.4.1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Angka | | 8 | 30,000,000 | 8 | 25,000,000 | 8 | 25,000,000 | 8 | 25,000,000 | 8 | 30,000,000 | 40 | 135,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 4.1.4.2 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Jumlah dokumen keuangan semesteran Angka | | 2 | 3,000,000 | 2 | 3,000,000 | 2 | 3,000,000 | 2 | 3,000,000 | 2 | 3,000,000 | 10 | 15,000,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 5.1.5 | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur % | 100 | 100 | 0 | 100 | 20,000,000 | 100 | 22,500,000 | 100 | 23,000,000 | 100 | 23,000,000 | 100 | 88,500,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/out come) | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--|--|--------|--|--------------|---|---|-----------------|---|-----|--------|------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|------------|---|--------|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | 5.1.5.1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah ketersediaan pakaian dinas aparatur Pegawai | | 35 | 0 | 35 | 20,000,000 | 40 | 22,500,000 | 40 | 23,000,000 | 40 | 23,000,000 | 165 | 88,500,000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi | 2.17.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat angka | | | | | | 79 | 2,955,905,171 | 80 | 4,637,000,000 | 80 | 4,064,300,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen | | | | | | 4 | 27,000,000 | 4 | 50,000,000 | 4 | 50,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 4 | 7,000,000 | 4 | 15,000,000 | 4 | 15,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan kinerja perangkat daerah | | | | | | 4 | 20,000,000 | 4 | 35,000,000 | 4 | 35,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Keuangan SKPD | | | | | | 2 | 2,490,235,171 | 2 | 3,005,000,000 | 2 | 3,055,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai/ASN yang mendapat gaji dan tunjangan | | | | | | 30 | 2,487,235,171 | 35 | 3,000,000,000 | 40 | 3,050,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan | | | | | | 2 | 3,000,000 | 2 | 5,000,000 | 2 | 5,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek | | | | | | 35 | 40,000,000 | 40 | 100,000,000 | 50 | 100,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/out come) | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--|--|--------|---------|------|--|---|-----------------|---|-----|--------|-----|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|-----|---|--------|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek | | | | | | 35 | 40,000,000 | 40 | 100,000,000 | 50 | 100,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah ketersediaan Pelayanan Umum Perangkat daerah | | | | | | 12 | 207,073,200 | 12 | 415,500,000 | 12 | 425,500,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | | | 12 | 4,315,200 | 12 | 6,500,000 | 12 | 6,500,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor | | | | | | 12 | 52,575,550 | 12 | 70,000,000 | 12 | 80,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 12 | 8,731,250 | 12 | 15,000,000 | 12 | 15,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah ketersediaan bahan logistik kantor | | | | | | 12 | 24,631,200 | 12 | 30,000,000 | 12 | 30,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan | | | | | | 12 | 11,000,000 | 12 | 13,000,000 | 12 | 13,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | | | 12 | 5,820,000 | 12 | 6,000,000 | 12 | 6,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | | | | | 12 | 100,000,000 | 12 | 275,000,000 | 12 | 275,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/out come) | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--|--|--------|---------|------|---|--|-----------------|---|-----|--------|-----|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|-----|---|--------|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | | | | | | | 0 | 1 | 700,000,000 | 0 | 0 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | | | | | | | 0 | 1 | 700,000,000 | 0 | 0 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah penyediaan jasa kantor | | | | | | 12 | 141,596,000 | 12 | 196,500,000 | 12 | 233,800,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 12 | 30,000,000 | 12 | 35,000,000 | 12 | 40,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 12 | 10,960,000 | 12 | 15,000,000 | 12 | 20,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 12 | 100,636,000 | 12 | 146,500,000 | 12 | 173,800,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 3 | 50,000,000 | 4 | 170,000,000 | 4 | 195,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/out come) | Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | |
|--|--|--------|---------|------|--|---|-----------------|---|-----|--------|-----|--------|-----|------------|------------|-------------|------------|---|-----|---|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan kendaraan | | | | | | | 3 | 50,000,000 | 3 | 110,000,000 | 3 | 125,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | |
| | | | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor | | | | | | | 0 | 1 | 60,000,000 | 1 | 70,000,000 | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan mendukung tercapainya tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Yang Mandiri.

Tabel di bawah ini menunjukkan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Tabel TC. 28
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Nilai Omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro | 637.250 JT | 685.625 JT | 740.500 JT | | | | |
| | Nilai Omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro yg dibina | | | | 801.790 JT | 873.840 JT | 963.200 JT | 963.200 JT |
| 2 | Persentase Koperasi Aktif | 70% | 74% | 77% | | | | |
| | Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas | | | | 4,3% | 4,8% | 5,3% | 5,3% |
| 3 | Persentase Pertumbuhan Usha Mikro | 0,50% | 0,74% | 0,89% | | | | |
| | Persentase Pertumbuhan Usaha ikro | | | | 0,84% | 0,94% | 1,04% | 1,,04% |

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, dan merupakan rangkaian rencana dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Bupati Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Magetan pada tahun 2018-2023.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yaitu **“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”**

Magetan, Januari 2022
KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MAGETAN



DINAS KOPERASI
DAN
USAHA MIKRO
SUKARTINI, Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 197404281999012001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Tripandita Nomor 15 Telp/Fax (0351) 895047 Magetan - 63319

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ /403.114/Kept/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan ketentuan pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. memperhatikan konsideran menimbang pada huruf a perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : a. Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan koordinasi dalam persiapan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan;
 2. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan;
 3. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.
- b. Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, khusus Kepala Bidang bertanggung jawab pada bahan dan data Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 pada bidangnya masing-masing.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Magetan, Januari 2022

KEPALA DINAS

KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MAGETAN



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kabupaten Magetan
Nomor : 188/ /403.114/Kept/2022
Tanggal: Januari 2022

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MAGETAN**

| NO | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN JABATAN / INSTANSI |
|------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Penanggung Jawab | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan |
| II. | Ketua | Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan |
| III. | Sekretaris | Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| IV. | Anggota | |
| | 1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi | a. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Perijinan c. Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan d. Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan |
| | 2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi | a. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi b. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi c. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi d. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi |
| | 3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro | a. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro b. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro c. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro d. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan |

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MAGETAN



SUKARTIN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19740429 199901 2 001

